



Ambisi Prabowo Bentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto berambisi mendirikan 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Inpres ini ditandatangani Presiden di Jakarta pada 27 Maret 2025.

Sirojul Khafid
sirojul@harianjogja.com

Koperasi Merah Putih merupakan upaya memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia Emas 2045. Koperasi Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial bagi warga desa. Layanan yang disediakan mencakup sembako dengan harga terjangkau, fasilitas simpan pinjam, klinik dan apotek desa, penyimpanan hasil pertanian dan perikanan dalam *cold storage*, hingga sistem distribusi logistik.

Prabowo menugaskan kementerian dan pemerintah daerah untuk mengambil peran penting. Contohnya, Kementerian Koperasi bertugas menyusun model bisnis koperasi, modul pendirian, serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) koperasi berbasis digital. Sementara itu, Kementerian Desa membantu pengadaan lahan serta menyosialisasikan program ini kepada masyarakat desa.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan empat langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. "Pada intinya ada empat yang menjadi porsi dari Kemendagri yang didorong oleh Pak Menteri untuk dikoordinasikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia," kata Bima, Selasa (15/4).

Langkah pertama, Kemendagri akan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk



Penrai kerja antre mengikuti informasi karier dan lowongan kerja pada Pameran Titian Karir Terpadu ITB 2025 di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Senin (14/4). Pemerintah Indonesia terus berupaya menyelesaikan penciptaan 17 juta lapangan kerja melalui empat program unggulan yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menyerap 3 juta tenaga kerja, proyek hilirisasi sumber daya alam yang berpotensi menghasilkan 8 juta lapangan kerja baru, Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, serta pembangunan 3 juta rumah per tahun yang diproyeksikan menciptakan 4,8 juta lapangan kerja.

Antara/Novrian Arbi

memfasilitasi pembentukan koperasi di lebih dari 80.000 desa dan kelurahan. *Kedua*, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pmdes), Kemendagri akan memberikan pendampingan teknis dalam pembentukan koperasi di tingkat desa. "Sesuai harapan Pak Menko [Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan], kami akan mempercepat pembentukan prototype. Jadi kami pilih beberapa potensi champion yang sudah siap, sama seperti MBG," ujarnya.

Ketiga adalah memastikan program koperasi desa terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Ini kita dorong untuk diselaraskan, dicantumkan di situ supaya ada landasannya," katanya.

Keempat, Kemendagri akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan daerah tetap *on track* dan sesuai dengan target pembentukan koperasi desa.

Selain menjabarkan langkah strategis, Bima juga menyoroti potensi besar sektor koperasi di Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 51.505 koperasi yang telah eksis, dengan rincian sekitar 5.297 merupakan Koperasi Unit

Desa (KUD), sementara sisanya merupakan koperasi non-KUD seperti koperasi simpan pinjam, serta koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat. "Ini adalah potensi yang harus kami identifikasi lagi, mana yang aktif dan mana yang tidak," katanya.

Terkait regulasi, Bima menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyusun template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai panduan teknis pembentukan koperasi. Perkada ini akan mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja, dasar hukum, serta peran perangkat daerah terkait, termasuk aspek pengawasan dan pendanaan. (Antara)